



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
KPKNL SINGARAJA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



KPKNL SINGARAJA

Melayani dengan Senyum, Adil, Kompeten, Tertib dan Inovatif

PENGANTAR

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2020 yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Singaraja pada Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Singaraja berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN sebagai unit eselon I, KPKNL Singaraja telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja instansi vertikal DJKN. *Performance* KPKNL Singaraja dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Singaraja dengan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2020. Oleh karena itu pengukuran kinerja dalam LAKIN 2020 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) KPKNL Singaraja merupakan kesepakatan seluruh jajaran subbagian maupun seksi-seksi pada KPKNL Singaraja berdasarkan Peta Strategis dan IKU Kemenkeu Three KPKNL.

Kami harapkan penyusunan LAKIN Tahun 2020 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Singaraja. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan dilandasi oleh nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, dan motto KPKNL Singaraja yaitu SAKTI (Senyum, Adil, Kompeten, Tertib, dan Inovatif) tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Singaraja yang telah mendukung dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat -Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Singaraja

Ttd.

Saiful Hadi
NIP 196705281992031003

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategis KPKNL	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Penetapan Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	43
C. Realisasi Anggaran.... ..	48
BAB IV PENUTUP	51

LAMPIRAN :

Capaian Kinerja KPKNL Singaraja Tahun 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Singaraja mengacu pada visi DJKN yaitu **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi KPKNL Singaraja, yaitu: (1) mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Singaraja adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJKN. Sesuai dengan Peta Strategis DJKN Tahun 2020, telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang merupakan Kontrak Kinerja KPKNL Singaraja Tahun 2020.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

KPKNL Singaraja selama tahun 2020 berhasil merealisasikan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) melebihi atau sama dengan target (hijau), 2 (dua) IKU yang kuning, dan 1 (satu) IKU yang merah yaitu persentase produktivitas lelang disebabkan oleh menurunnya kondisi ekonomi, khususnya pandemi Covid-19 yang memberi efek turunnya daya beli masyarakat selama Q2 s.d Q4, sehingga capaian bea lelang pembeli maupun penjual yang berasal dari lelang PL 1 maupun Pegadaian jauh dari target yang ditetapkan. Rincian realisasi Indikator Kinerja Utama KPKNL Singaraja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian target	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a- CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	80,27%	80,27%	Dibawah target
		1b- CP	Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (saldo PNDS s.d 2016)	2,4%	3,09%	128,901%	Diatas target
		1c- N	Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100%	100%	100%	Diatas target
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a- CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,6 (skala 5)	4,61	100,22%	Diatas target
3.	Pengelolaan lelang yang optimal	3a- CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%	79,18%	79,18%	Dibawah target
4.	Manajemen pelayanan yang berkualitas	4a- CP	Indeks Ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	85 (skala 100)	97,75	113,66%	Diatas target

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian target	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5.	Tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a- CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	101,89%	101,89%	Diatas target
		5b- CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	151,54%	120%	Dibawah Target
		5c- CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%	125,52%	125,52%	Diatas target
		5d- CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	166,67%	166,67%	Diatas target
6.	Penilaian yang berkualitas	6a- CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	1,66%	194,48%	Diatas target
7	Tata kelola lelang yang efektif	7a- CP	Persentase produktivitas lelang	34%	52,71%	155,02%	Diatas target
		7b- CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%	100%	111,11%	Diatas target
8	SDM yang kompetitif	8a- N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	87	92,24	106,02%	Diatas target
9	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	9a- CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%	100%	125%	Diatas target

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		9b-CP Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%	99,46%	99,46%	Dibawah target
10	SDM yang kompeten	10 a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	115,71%	115,71%	Diatas target
11	Organisasi yang fit for purpose	11 a-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	70	92,70	132,43%	Diatas target
		11 b-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80	92,07	115,09%	Diatas target
12	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	12 a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	97,90%	103,05%	Diatas target

Dengan demikian maka NKO KPKNL Singaraja tahun 2020 yaitu 104,85%

C. PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi agar kinerja berjalan optimal. Berikut ini adalah strategi yang diambil oleh KPKNL Singaraja untuk menghadapi kendala yang ada.

Seksi/bagian	No	Permasalahan	Langkah-langkah antisipatif
Umum	1.	Tidak optimalnya IKU Kualitas pelaksanaan anggaran akibat pergerakan	Berkoordinasi dengan PIC terkait penggunaan form IKPA

		angka tersebut menyebabkan hasil akhir perhitungan bersifat dinamis	
PKN	1.	Pemanfaatan BMN yang kurang Optimal	Seksi PKN akan melakukan monitoring berkala pada setiap satker mengenai produk pengelolaan BMN berupa persetujuan sewa dan pemindahtanganan / penghapusan untuk memastikan masing-masing satker sudah menindaklanjuti persetujuan tersebut.
	2.	Persiapan Sertifikasi tahun 2021	Melanjutkan koordinasi dengan KPKNL Denpasar selaku KPKNL Induk, Kantor Pertanahan dan satker target sertifikasi terkait persiapan sertifikasi tahun 2021.
PENILAIAN	1	terdapat status objek yang belum bisa dinaikkan sampai dengan Status 9. Didasarkan pada perbedaan backup data, hal ini menyebabkan adanya selisih ketika melakukan Rekon IP.	Melakukan koordinasi terkait penyelesaian rereval kepada pusat
PN	1.	banyak responden yang tidak mengisi kuesioner, terlihat dari data yang masuk pada google form hanya 24 responden.	KPKNL Singaraja akan menyiapkan data responden untuk perhitungan IKPL tahun kedepannya.
	2.	Kurang optimalnya penurunan outstanding piutang negara	Selama Pandemi Covid-19, Seksi PN berencana untuk menyampaikan Penagihan melalui Surat.
LELANG	1.	Pandemi memberi efek turunya daya beli masyarakat selama Q2 s.d Q4, sehingga capaian bea lelang pembeli maupun penjual yang berasal dari lelang PL I maupun Pegadaian masih jauh dari target yang ditetapkan.	Mem-follow up lelang PL I dan pegadaian untuk membantu meningkatkan capaian bea lelang yang belum mencapai target yang ditetapkan

	2.	PNBP lelang yang kurang optimal akibat daya beli masyarakat selama Q2 s.d Q5	Seksi Lelang akan mengimbau kepada pemohon lelang untuk lebih selektif dalam mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku sehingga dapat membantu dalam pencapaian target baik pokok lelang maupun PNBP.
HI	1.	Kesulitan melacak jejak pembayaran setoran tidak jelas	Menelusuri transaksi terkait ke Bank tempat Rekening Penampungan Berada
KI	1.	Kurang efektifnya aplikasi file excel pengelolaan kinerja. Formula yang kurang tepat tidak bisa diperbaiki karena terkunci	Mengusulkan ke Kantor pusat agar dibuatkan program yang lebih baik

Masalah-masalah yang sering dihadapi diharapkan dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan lebih baik dan diupayakan agar kinerja KPKNL Singaraja akan semakin meningkat dengan pencapaian yang optimal serta mampu berjalan dengan lebih baik, yang nantinya diharapkan semakin bisa mengatasi hambatan yang ada, agar pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada KPKNL Singaraja dapat berjalan lancar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL Singaraja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

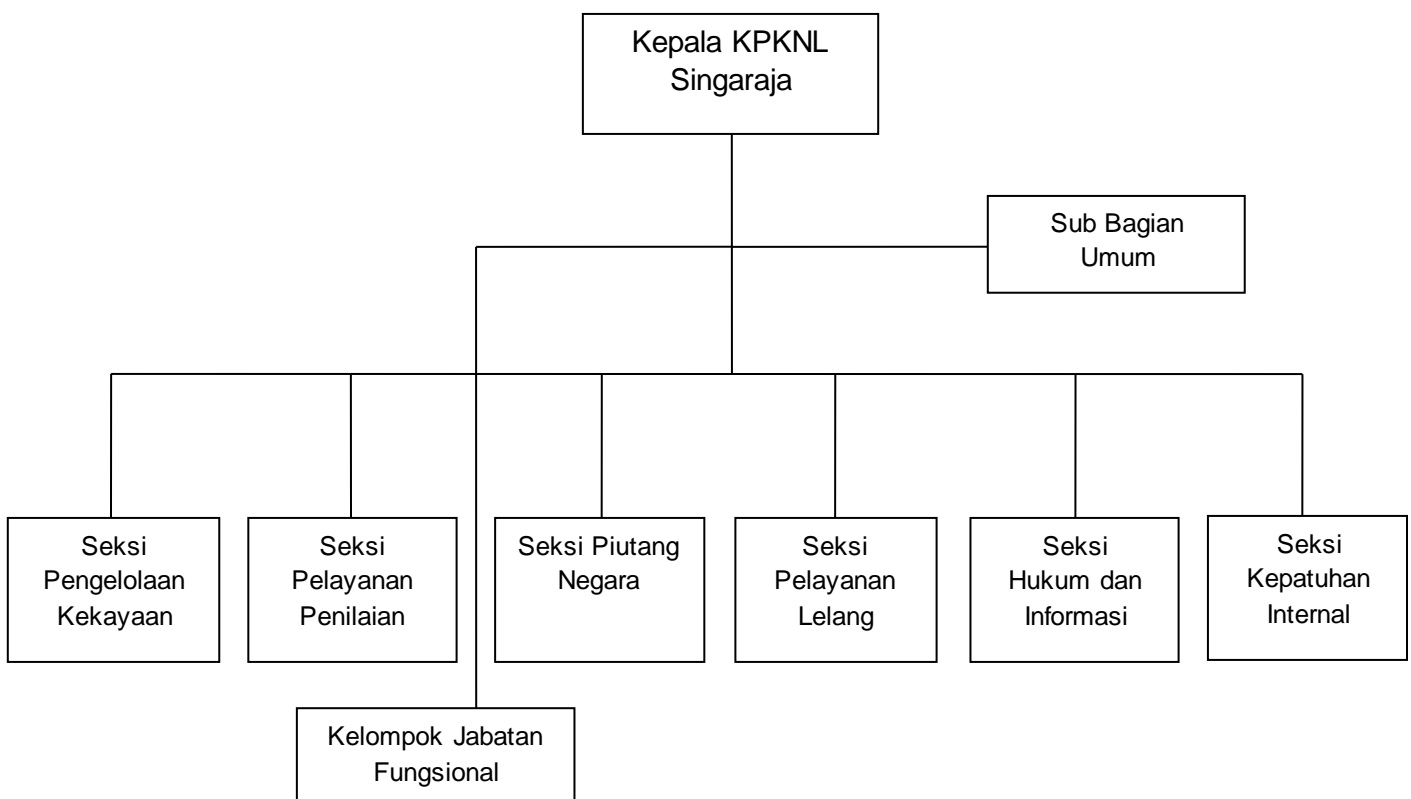
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Singaraja memiliki satu subbagian, enam seksi dan kelompok jabatan fungsional. Struktur Organisasi KPKNL Singaraja terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Subbagian Umum
3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Seksi Pelayanan Penilaian
5. Seksi Piutang Negara
6. Seksi Pelayanan Lelang
7. Seksi Hukum dan Informasi
8. Seksi Kepatuhan Internal
9. Kelompok jabatan fungsional.

BAGAN ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Singaraja didukung oleh 28 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, hukum, administrasi, sosial, dan lainnya. Komposisi pegawai DJKN berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jenis kelamin, dan umur adalah sebagai berikut :



KOMPOSISI PEGAWAI
Per-31 Desember 2020

A. Berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SLTA	-	2	3	-	5
D1	-	-	-	-	-
D3	-	8	3	-	11
D4/S1	-	-	10	-	10
S2	-	-	1	1	2
JUMLAH	-	10	17	1	28

B. Berdasarkan kelompok jabatan fungsional

JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
PENILAI	1
PEJABAT LELANG	1

B. PERAN STRATEGIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

KPKNL memiliki peran strategis yaitu sebagai ujung tombak dalam hal penilaian kekayaan negara, inventarisasi barang milik negara/daerah, pengelolaan Barang Milik Negara, pengamanan kekayaan negara yang berupa piutang macet yang ada pada debitur dan dalam menggalakkan pelaksanaan lelang dalam rangka meningkatkan pemasukan negara dan mempercepat laju perekonomian di tanah air dan KPKNL berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang agar dapat mencapai target yang ditetapkan maka diperlukan suatu pedoman sebagai acuan yaitu visi DJKN yang diharapkan dapat menjadi penggerak pada setiap pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun visi DJKN yaitu : ” **Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**”. Selanjutnya visi DJKN dijabarkan dalam bentuk misi. Untuk mewujudkan misi tersebut, dituangkan lagi dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang nyata dirumuskan secara jelas. Adapun misi KPKNL Singaraja yang juga merupakan misi DJKN sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk menghadapi dan mengantisipasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau dunia yang bergerak cepat serta kompetitif sebagai dampak globalisasi perekonomian dunia terutama akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka diperlukan peningkatan profesionalisme dan etos kerja, pembinaan karier pegawai yang sistematis dan berkesinambungan, kualitas pelayanan yang dapat memuaskan *stakeholder*, serta akuntabilitas publik dan aparatur yang bersih (bebas dari unsur KKN). Hal ini akan menjadikan DJKN sebagai lembaga yang dibanggakan masyarakat sehingga dapat tetap eksis dan mampu memberikan andil yang nyata dalam pembangunan sebagai wujud tanggung jawab sosial atas penggunaan dana APBN. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dimaksud, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja.

Dalam pelaksanaan tugas KPKNL Singaraja terus berupaya untuk profesional dan selalu berpegang pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sehingga hasil yang dicapai dalam hal pengelolaan kekayaan Negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang Negara dan lelang dapat optimal dan memuaskan. Selain itu hasil berupa utilisasi kekayaan negara, biaya administrasi dan bea lelang yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat lebih optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

A.1 Visi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja sepakat untuk menjalankan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yaitu: ” **Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**”. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas.

A.2 Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Singaraja menetapkan misi yang sama dengan DJKN, yang terdiri dari :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

A.3 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya program tersebut berupa terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

A.4 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis.

Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil yang dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Tahun 2020 KPKNL Singaraja menetapkan sebelas sasaran strategis yang akan dicapai :

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien;
3. Pengelolaan lelang yang optimal;
4. Manajemen pelayanan yang berkualitas;
5. Tata kelola kekayaan negara yang efektif;
6. Penilaian yang berkualitas;
7. Tata kelola lelang yang efektif;
8. Edukasi yang efektif;
9. Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
10. SDM yang kompeten;
11. Organisasi yang fit for purpose;
12. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal.

A.5 Kebijakan

Kebijakan menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihan berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, keuangan, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Dengan kebijakan ini diharapkan terdapat kelancaran dan keterpaduan langkah dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi DJKN.

A.6 Program

Program/kegiatan KPKNL Singaraja sebagaimana tertuang dalam rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” .

B. PENETAPAN KINERJA

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
- 2) pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2020	Realisasi 2020
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Nilai manfaat ekonomi pada lingkup Kantor Wilayah dan KPKNL diperoleh dari:	100%	80,27%

		<p>a. PNBP Aset (PNBP Aset)</p> <p>1). penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan,</p> <p>2). penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan</p> <p>b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)</p> <p>Penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara</p> <p>c. PNBP Lelang (PNBP Lelang)</p> <p>1). bea lelang,</p> <p>2). bea lelang pegadaian,</p> <p>3). denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,</p> <p>4). biaya permohonan lelang,</p> <p>5). penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,</p> <p>6). pemberian izin operasional Balai Lelang,</p> <p>7). pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II,</p> <p>8). perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II, dan</p> <p>9). penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.</p>		
--	--	--	--	--

1b-CP	Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara	<p>IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2016 atau sebelumnya, pada akhir tahun (31 Desember 2020) diharapkan turun menjadi 95%. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN yang didownload tanggal 22 Januari 2020. Terhadap outstanding dengan mata uang asing dilakukan konversi dengan mata uang rupiah (nilai kurs tengah BI) per tanggal 31 Desember 2019.</p> <p>Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.</p> <p>Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penjumlahan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT): <ol style="list-style-type: none"> a. Angsuran b. Penarikan/Pengembalian c. Pelunasan d. PSBDT 2. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2016 atau sebelumnya yang lunas pada tahun berjalan. 	2,4%	3,09%
1c-N	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian pengguna BMN dengan SBSK	Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk existing luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan	100%	100%

2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*)

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2020	Realisasi 2020
2a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (<i>quick win</i>). Survei dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.	4,60	4,61

3. Pengelolaan lelang yang optimal

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I / JF Pelelang), dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2020	Realisasi 2020
3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	<p>Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.</p> <p>Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I / JF Pelelang, dan Pegadaian dalam periode tertentu.</p>	100%	79,18%

4. Manajemen pelayanan yang berkualitas

Manajemen pelayanan yang berkualitas adalah serangkaian proses kegiatan dalam menata dan mengelola layanan-layanan yang diberikan kepada pengguna jasa sehingga mampu menghasilkan layanan yang memenuhi asas-asas (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2020	Realisasi 2020
4a-CP	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	<p>Tepat waktu bisa diartikan sebagai ketersediaan informasi kepada pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan perusahaan sangat penting bagi tingkat manfaat dan nilai laporan</p> <p>Ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang dibagi menjadi 14 layanan, meliputi:</p> <p>1.Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL</p> <p>a) Jumlah Objek 1-50 b) Jumlah Objek 51-100 c) Jumlah Objek >100</p> <p>2. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL</p> <p>3.Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL</p>	86	97,12

		<p>4. Penetapan Jadwal Lelang</p> <p>5. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang</p> <p>6. Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang</p> <p>7. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang</p> <p>8. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)</p> <p>9. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)</p> <p>10. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL</p> <p>11. Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara</p> <p>12. Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan</p> <p>13. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas</p> <p>14. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai</p>		
--	--	--	--	--

5. Tata kelola kekayaan negara yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan kekayaan negara, kegiatan tata kelola meliputi seluruh siklus pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara, dan lelang. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2020	Realisasi 2020
5a-CP	Persentase bidang tanah yang disertifikatkan	<p>Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipkatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:</p> <p>A. Kendali BPN</p> <p>1.Melaksanakan penswertipkatan BMN;</p> <p>2.Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertifikatkan.</p> <p>B. Kendali K/L</p> <p>1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;</p>	100%	101,89%

	<p>2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;</p> <p>3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;</p> <p>4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;</p> <p>5. Mengajukan permohonan sertifikasi;</p> <p>6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;</p> <p>7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.</p> <p>C. Kendali Kemenkeu</p> <p>1. Menyimpan asli sertipikat;</p> <p>2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan;</p> <p>3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;</p> <p>4. Pengalokasian anggaran sertifikasi.</p>		
--	--	--	--

5b-CP	<p>Persentase efektivitas penyelesaian BKN</p>	<p>IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.</p> <p>IKU Persentase Efektifitas penyelesaian BKN terbagi menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BKN dengan SP3N s.d. 31 Desember 2010 (Kategori I); 2. BKN dengan SP3N tanggal 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2019 (Kategori II); 3. BKN dengan SP3N Tahun 2020 (Kategori III). <p>Pembobotan atas ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BKN dengan SP3N s.d. 31 Desember 2010 bobot 1,5; 2. BKN dengan SP3N tanggal 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2019 bobot 1,0; 3. BKN dengan SP3N Tahun 2020 bobot 0,5. <p>Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKN diukur dengan penjumlahan BKN Lunas, BKN Penarikan, BKN dikembalikan, dan BKN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan total BKN target BKN 50 berkas</p>	100%	151,54%
5c-CP	<p>Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi</p>	<p>Nilai kekayaan negara yang diutilisasi diperoleh dari nilai kekayaan negara yang nilai BMN yang ditetapkan status penggunaannya.</p> <p>Pengukuran nilai kekayaan negara yang diutilisasi memiliki tujuan untuk memastikan aset yang dikelola oleh DJKN telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya</p>	100%	114,05%

		(the highest and best use principle).		
5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	<p>Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.</p> <p>Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).</p>	100%	166,67%

6. Penilaian yang berkualitas

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang berkualitas adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan yang berlaku umum; diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku; dan dapat menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut; serta dapat digunakan oleh pemohon/pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait aset yang dinilai.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2020	Realisasi 2020
6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	<p>Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.</p> <p>Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).</p> <p>Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi</p>	30%	1,37%

		<p>basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.</p> <p>Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.</p> <p>Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama</p> <p>Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.</p>		
--	--	---	--	--

7. Tata kelola lelang yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan piutang negara dan lelang, kegiatan tata kelola meliputi beberapa kegiatan seperti perencanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2020	Realisasi 2020
7a-CP	Persentase produktivitas lelang	Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.	34%	52,71%
7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.	90%	100%

		<p>Implementasi e-auction meliputi:</p> <p>1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.</p> <p>2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)</p> <p>Target capaian e-Auction dan e-Conventional Auction adalah sebesar 90% dari realisasi frekuensi lelang, dengan catatan target e-Auction adalah minimal sebesar 80% dari realisasi frekuensi lelang.</p>		
--	--	--	--	--

8. Edukasi yang efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

1. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
2. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang.

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2020	Realisasi 2020
8a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau	87	92,24

		<p>workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).</p> <p>Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,</p> <p>2) kualitas materi (bobot 15%),</p> <p>3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan</p> <p>4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).</p>		
--	--	--	--	--

9. Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2020	Realisasi 2020
9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini	40%	100%

	pengelolaan aset	difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.		
9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa objek penilaian kembali BMN	<p>Sisa aset objek penilaian kembali BMN yang harus ditindak lanjuti adalah obyek BMN kategori K1 yang wajib diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2020</p> <p>Jumlah objek BMN berbasis Nomor Urut Perolehan (NUP) BMN.</p> <p>Tindak lanjut atas suatu obyek dinyatakan selesai apabila:</p> <p>Status LHIP Selesai (Tahap 9)</p> <p>Jangka waktu penilaian dimulai dari 01 Februari 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p> <p>Target jumlah NUP untuk KPKNL Singaraja adalah sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) NUP.</p> <p>Ruang Lingkup: KPKNL Singaraja</p> <p>penghitungan cut of date nya adalah tanggal 5 di awal bulan setelah berakhirnya setiap triwulan kecuali jika tanggal 5 jatuh pada hari libur maka cut of date pada tanggal berikutnya</p>	100%	99,46%

10. SDM yang kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2020	Realisasi 2020
10a -N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	<p>mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.</p> <p>Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan</p> <p>Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP).</p> <p>1 jamlat adalah 45 menit</p> <p>Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.</p> <p>Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DK1.</p> <p>Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya</p> <p>Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.</p>	100%	115,71%

		<p>Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bawahan yang akan pensiun di tahun 2020; - bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan; - bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2020; - Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2020 tidak diperhitungkan di unit barunya -- pegawai pada unit non-eselon 		
--	--	---	--	--

11. Organisasi yang fit for purpose

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2020	Realisasi 2020
11a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk	70	92,70

		<p>memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.</p> <p>Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.</p>		
11b -N	Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD kode etik pegawai	<p>Tingkat efektivitas FGD kode etik merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.</p> <p>Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), understanding (pemahaman peserta terhadap materi FGD), learning enthusiasm (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), contribution to learning (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai).</p> <p>Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).</p> <p>Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain terkait kode etik, akan terdapat tema lain dalam pelaksanaan FGD. Pengukuran</p>	80	92,07

		efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.		
--	--	---	--	--

12. Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2020	Realisasi 2020
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	<p>Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.</p> <p>Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan</p>	95%	97,84%

		<p>secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses.</p> <p>Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:</p> <p>1) Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (Value for Money).</p> <p>2) Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.</p> <p>3) Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).</p> <p>4) Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-</p>		
--	--	--	--	--

		<p>35/2017).</p> <p>5) Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.</p> <p>6) Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN.</p> <p>7) Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP.</p> <p>8) Perencanaan Kas (Renkas), sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.</p> <p>9) Penyampaian LPJ, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio LPJ tepat waktu terhadap seluruh LPJ yang disampaikan ke KPPN.</p> <p>10) Pengembalian SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.</p> <p>11) Retur SP2D, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan jumlah SP2D yang terbit.</p> <p>12) Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap).</p> <p>13) Pagu Minus, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan,</p>		
--	--	--	--	--

		<p>dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya.</p> <p>14) Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.</p>		
--	--	---	--	--

Untuk menerjemahkan strategi kedalam suatu tindakan, Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi KPKNL tahun 2020 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 12 sasaran strategis (SS) dan 20 indikator kinerja utama (IKU).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal								
1a-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	8,95%	20,83%	23,01%	44,54%	44,26%	80,27%	80,27%	
Capaian	120%	69,44%	76,69%	74,24%	73,76%	80,27%	80,27%	
Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal								
Sebelum adendum			1b-CP Tingkat outstanding Piutang Negara (Polarisasi minimize)					
Setelah adendum			1b-CP Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara					
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P

Target sebelum adendum	99%	98%	98%	97%	97%	95%	95%	
Target Setelah adendum	0,50%	1%	1%	2%	2%	2,4%	2,4%	
Realisasi sebelum adendum	99,41%	99,29%	99,29%	-	-	-	-	
Realisasi setelah adendum	0,59%	0,71%	0,71%	2,90%	2,90%	3,09%	3,09%	
Capaian sebelum adendum	99,58%	98,68%	98,68%	-	-	-	-	
Capaian Setelah adendum	117,76%	70,88%	70,88%	120%	120%	120%	120%	
Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal								
1c-N Persentase pengukuran tingkat kesesuaian pengguna BMN dengan SBSK								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P

Target sebelum adendum	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Target Setelah adendum		50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi		57,95%	57,95%	100%	100%	100%	100%	
Capaian Sebelum adendum	-	115,90%	115,90%	-	-	-	-	
Capaian Setelah adendum		115,90%	115,90%	120%	120%	100%	100%	
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien								
2a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target						4,60	4,60	
Realisasi						4,61	4,61	
Capaian						100,22%	100,22%	

Pengelolaan lelang yang optimal								
3a-CP Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Po/ K P
Target sebelum adendum	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
Target Setelah adendum	10%	30%	30%	50%	50%	100%	100%	
Realisasi	18,05%	34,77%	34,77%	52,21%	52,21%	79,18%	79.18%	
Capaian Sebelum adendum	120%	115,91%	115,91%	-	-	-	-	
Capaian Setelah adendum	120%	115,91%	115,91%	104,42%	104,42%	79,18%	79,18%	
Manajemen pelayanan yang berkualitas								
4a-CP Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang								

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	86	86	86	86	86	86	86	
Realisasi	97,55	98	97,94	97,96	97,96	97,12	97,75	
Capaian	113,43%	113,95%	113,88%	113,91%	113,91%	113,66%	113,66%	

Tata kelola kekayaan negara yang efektif

5a-CP Persentase bidang tanah yang disertifikatkan

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target		20%	20%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi		100%	100%	101,89%	101,89%	101,89%	101,89%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	101,89%	101,89%	

Tata kelola kekayaan negara yang efektif

5b-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	

Realisasi	127%	128%	128%	139,23%	139,23%	151,54%	151,54%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Tata kelola kekayaan negara yang efektif

5c-CP Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	187,49%	234,96%	234,96%	428,45%	428,45%	114,05%	114,05%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	114,05%	114,05%	

Tata kelola kekayaan negara yang efektif

5d-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target sebelum adendum	25%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	

Target								
Setelah adendum		50%	50%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	0%	125%	125%	125%	125%	166,67%	166,67%	
Capaian Sebelum adendum		120%	120%	-	-	-	-	
Capaian Setelah adendum		120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Penilaian yang berkualitas								
6a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
Realisasi	5,49%	0%	5,49%	0%	1,83%	1,37%	1,37%	
Capaian	181,7%	120%	181,7%	120%	120%	120%	120%	
Tata kelola lelang yang efektif								

7a-CP Persentase produktivitas lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	15%	20%	20%	25%	25%	34%	34%	
Realisasi	50%	46,53%	46,53%	49,71%	49,71%	52,71%	52,71%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Tata kelola lelang yang efektif								
7b-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	50%	50%	90%	90%	
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	111,11%	111,11%	
Edukasi yang efektif								
8a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P

Target		87	87		87	87	87	
Realisasi		91,37	91,37		91,37	93,11	92,24	
Capaian		105,02%	105,02%		105,02%	107,02%	106,02%	
Pengawasan dan pengendalian yang efektif								
9a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target		40%	40%		40%	40%	40%	
Realisasi		92,86%	92,86%		92,86%	100%	100%	
Capaian		120%	120%		120%	120%	120%	
Pengawasan dan pengendalian yang efektif								
9b-CP Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa objek penilaian kembali BMN								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target sebelum adendum	10%	25%	25%	75%	75%	100%	100%	

Target								
Setelah adendum	5%	25%	25%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	0%	0%	0%	80,22%	80,22%	99,46%	99,46%	
Capaian Sebelum adendum	0%	0%	0%	-	-	-	-	
Capaian Setelah adendum	0%	0%	0%	106,96%	106,96%	99,46%	99,46%	

SDM yang kompeten

10a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	17,14%	68,57%	68,57%	111,72%	111,72%	115,71%	115,71%	
Capaian	114,29%	171,42%	171,42%	111,72%	111,72%	115,71%	115,71%	

Organisasi yang fit for purpose

11a-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target						70	70	
Realisasi						92,70	92,70	
Capaian						120%	120%	
Organisasi yang fit for purpose								
11b-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD kode etik pegawai								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	N/A	92	92	93	92,5	91	92,07	
Capaian	N/A	115%	115%	116%	115,63%	113,72%	115,09%	
Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal								
12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P

Target	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	98,56%	98,56%	97,84%	97,84%
Capaian	N/A	N/A	N/A	103,75%	103,75%	102,98%	102,98%

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

KPKNL Singaraja memiliki dua belas (12) sasaran strategis sebagaimana disebutkan dalam Kemenkeu – Three. Sasaran strategis beserta indikator kinerja utama masing masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien;
3. Pengelolaan lelang yang optimal;
4. Manajemen pelayanan yang berkualitas;
5. Tata kelola kekayaan negara yang efektif;
6. Penilaian yang berkualitas;
7. Tata kelola lelang yang efektif;
8. Edukasi yang efektif;
9. Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
10. SDM yang kompeten;
11. Organisasi yang *fit-for-purpose*;
12. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini adalah Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara, tingkat penurunan outstanding piutang negara, dan persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dan SBSK. Pada tahun 2020 Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara mencapai 80,27%, tingkat penurunan outstanding piutang negara 3,09%, sedangkan untuk Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK mencapai 100%. KPKNL Singaraja telah semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut, termasuk melakukan penggalian potensi lelang khususnya dari lelang eksekusi, dan imbauan terus-menerus kepada satker

terkait pemanfaatan BMN. Meskipun hal tersebut telah dilaksanakan target pada sasaran strategis ini belum tercapai. Adapun beberapa masalah yang mendasari belum tercapainya target ini meliputi, pandemi covid memberi efek turunnya daya beli masyarakat selama Q2 s.d. Q4, sehingga capaian bea lelang pembeli maupun penjual ikut turun. Adapun perencanaan kegiatan tahun 2021 untuk meningkatkan capaian tersebut, meliputi:

- Menyampaikan penagihan melalui surat;
- Melakukan inventarisasi satker yang sudah mendapat persetujuan sewa namun belum ditindaklanjuti menjadi perjanjian sewa lalu dikoordinasikan agar segera ditindaklanjuti;
- Menetapkan lelang eksekusi berpotensi laku;
- Melakukan penagihan langsung/melalui saluran komunikasi lainnya;
- Berkoordinasi dengan satuan kerja terkait persiapan kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian pengguna BMN dengan SBSK tahun 2021.

2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini adalah Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 4,6 dan tercapai sebesar 4,61 sehingga realisasi IKU KPKNL Singaraja tersebut melampaui target yang ditetapkan. Perhitungan ini berdasarkan pada kuesioner yang ditujukan kepada pengguna layanan. Selama tahun 2020 permasalahan yang dialami adalah tuntutan dari stakeholder atas kualitas pelayanan yang makin baik. Pada tahun anggaran 2021 seksi PKN, Penilaian, PN, Lelang, dan HI akan menyiapkan data responden untuk perhitungan IKPL Tahun berjalan.

3. Pengelolaan lelang yang optimal

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini adalah Persentase hasil lelang (pokok lelang). Persentase hasil lelang pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% (Rp 70.363.000.000) dan tercapai sebesar 79,18% sehingga realisasi IKU KPKNL Singaraja tersebut belum mencapai target. Target belum tercapai, akibat dari pandemi yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat selama Q2 s.d Q4 sehingga capaian pokok lelang yang berasal dari lelang PL 1 maupun pegadaian masih jauh dari target yang ditetapkan. Kedepannya seksi lelang akan melakukan penggalan potensi lelang eksekusi.

4. Manajemen pelayanan yang berkualitas

Indikator kinerja utama dalam sasaran strategis ini yaitu Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang. Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2020 ditargetkan 86 dan

tercapai 97,75. Layanan yang diberikan kepada stakeholder selama Q1 sampai Q4 telah dilakukan secara optimal. Dibuktikan dengan capaian layanan pada setiap seksi sudah sangat baik meskipun terdapat kendala pelaksanaan akibat Pandemi Covid-19. Dan untuk tahun 2021 seksi PKN, PN, dan Lelang tetap melaksanakan pelayanan semaksimal mungkin sesuai SOP.

5. Tata kelola kekayaan negara yang efektif

Indikator kinerja utama dalam sasaran strategis ini yaitu :

- a. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan
- b. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN
- c. Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi
- d. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

- a. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Komponen indikator kinerja utama ini yaitu, melaksanakan pensertipikatan BMN. pada tahun 2020 ditetapkan target sebesar 53 bidang adapun realisasi target ini sebesar 54 bidang tanah.

Tahun 2020 seluruh komponen tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Tercapainya seluruh komponen pada IKU tahun 2020 ini tidak terlepas dari intensnya koordinasi dengan kantor pertanahan dan satker target sertifikasi yang dilakukan oleh seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. Disamping itu juga melalui koordinasi dengan KPKNL Denpasar selaku KPKNL Induk, dilakukan penggalan potensi untuk persiapan sertipikat tahun 2021. Berdasarkan komponen tersebut sehingga capaian IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan tahun 2020 sebesar 101,89%.

- b. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

Komponen dalam IKU ini yaitu realisasi BKPN yang dapat diselesaikan

Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 50 Berkas dan realisasi target sebesar 97 Berkas. Tercapainya target IKU ini tidak lepas dari intensitas penelitian lapangan terkait BKPN salah satu kasusnya BKPN yang tidak di dukung dengan barang jaminan penyerahan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Denpasar. Harapannya pada tahun 2021 Triwulan 1 akan dilakukan penyelesaian BKPN dengan penarikan.

- c. Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi

Komponen dalam IKU ini terdiri dari nilai kekayaan negara yang diutilisasi atas nilai BMN yang ditetapkan status penggunaannya. Selama tahun berjalan KPKNL Singaraja terus berkoordinasi dengan satker untuk segera mengajukan PSP. Target KPKNL Singaraja

pada IKU ini sebesar Rp 333.079.000.000 dan realisasi target sebesar Rp 418.081.476.443. Berdasarkan kedua komponen diatas maka capaian IKU persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi sebanyak 114,05%.

d. **Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Pada komponen IKU ini terdiri dari kegiatan implementasi evaluasi kinerja BMN. Target KPKNL Singaraja 2020 pada IKU ini sebesar 12 dan realisasi target sebesar 20. Berdasarkan kedua komponen diatas maka capaian IKU persentase implementasi evaluasi kinerja BMN sebanyak 166,67%.

6. Penilaian yang berkualitas

Indikator kinerja utama dalam sasaran strategis ini adalah deviasi ketergunaan hasil penilaian. Pada tahun 2020, target yang ditetapkan untuk IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian maksimal sebesar 30% dan realisasi sebesar 1,66% . Berdasarkan hal tersebut, capaian kinerja KPKNL Singaraja untuk IKU ini adalah 194,48%

7. Tata kelola lelang yang efektif

Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini meliputi :

- Persentase produktivitas lelang

Pada tahun 2020 KPKNL Singaraja memiliki target Persentase produktivitas lelang sebanyak 34% dengan terealisasi sebanyak 52,71%. Hal ini membuat Capaian targetnya sebanyak 155,02%. Selama tahun berjalan KPKNL Singaraja secara berkelanjutan berkoordinasi dengan pemohon lelang khususnya untuk lelang BMN/D agar setiap pelaksanaan lelang yang dilakukan dapat laku terjual. Direncanakan pada tahun 2021 akan mengimbau pemohon lelang untuk lebih selektif dalam mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku.

- Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Pada tahun 2020 KPKNL Singaraja memiliki target Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction sebanyak 90% dengan terealisasi sebanyak 100%. Hal ini membuat Capaian targetnya sebanyak 111,11%. Selama tahun berjalan KPKNL Singaraja secara terus menerus mengingatkan pemohon lelang tentang keunggulan pelaksanaan lelang e-auction. Direncanakan pada tahun 2021 akan mengimbau kepada pemohon lelang untuk melakukan lelang melalui e-auction.

8. Edukasi yang efektif

Indikator kinerja utama dalam Sasaran Strategis ini adalah Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dimana pada tahun 2020 KPKNL Singaraja mendapat target sebesar 87 dan

realisasinya sebesar 92,24. Hasil ini berkat pengumpulan survei edukom telah dilaksanakan melalui kuesioner berbentuk google form maupun survei fisik. Tetapi pada Semester I banyak responden (peserta sosialisasi) yang tidak mengisi kuesioner, terlihat dari data yang masuk pada google form hanya 43 responden. Serta keterbatasan DIPA dan kondisi pandemi menyebabkan tidak dimungkinkannya acara sosialisasi secara fisik. Maka rencana edukom pada tahun 2021 akan dilaksanakan secara online.

9. Pengawasan dan pengendalian yang efektif

Indikator kinerja utama dalam Sasaran Strategis ini yaitu persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset dan persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN.

- persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset

Pada tahun 2020 KPKNL Singaraja memiliki target sebesar 40% dengan realisasi sebesar 100%. Realisasi tersebut merupakan hasil koordinasi salah satunya dengan KPKNL Gorontalo terkait penyelesaian tindak lanjut persetujuan. Direncanakan untuk pelaksanaan pada tahun 2021 KPKNL Singaraja akan berkoordinasi terkait tindak lanjut persetujuan yang telah diberi.

- persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN

Pada tahun 2020 KPKNL Singaraja memiliki target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 99,46%. Realisasi tersebut merupakan hasil koordinasi untuk peningkatan status satker. Kurangnya realisasi diatas akibat dari masih adanya perbedaan backup data yang menyebabkan adanya selisih ketika melakukan Rekon IP. Maka status objek belum bisa dinaikkan. Pada tahun 2021 KPKNL Singaraja akan berkoordinasi terkait penyelesaian rereval kepada pusat.

10. SDM yang kompeten

Pada tahun 2020 KPKNL Singaraja memiliki target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 115,71%. Realisasi tersebut merupakan hasil koordinasi dengan PIC terkait status kepegawaian pegawai. Monitoring dan pendataan terhadap capaian pegawai yang baru masuk juga dilaksanakan selama tahun berjalan. Lamanya proses penjatuhan hukuman disiplin membuat ketidakjelasan status kepegawaian sehingga membuat capaian tidak maksimal. Pada tahun 2021 KPKNL Singaraja akan membuat daftar tracking capaian IKU pada masing-masing pegawai serta pemberian himbauan terkait partisipasi e-learning.

11. Organisasi yang *fit-for-purpose*

Indikator kinerja utama dalam Sasaran Strategis ini yaitu Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC serta indeks efektivitas penyelenggaraan FGD kode etik pegawai.

- Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC

Pada tahun 2020 KPKNL Singaraja memiliki target sebesar 70 dengan realisasi sebesar 92,70. IKU Hasil review pengelolaan kinerja selama tahun 2020 menghasilkan nilai capaian sebesar 132,43%.

- indeks efektivitas penyelenggaraan FGD kode etik pegawai

Pada tahun 2020 KPKNL Singaraja memiliki target sebesar 80 dengan realisasi sebesar 92,07. Capaian realisasi pada IKU ini sebesar 115,09%, capaian tersebut tidak lepas dari usaha KPKNL untuk memberikan arahan-arahan serta pelaksanaan FGD yang sesuai. Koordinasi dengan PIC terkait FGD akan dilaksanakan di tahun 2021 untuk memperbaiki kekurangan pada tahun 2020.

12. Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal

Indikator kinerja utama dari sasaran strategis ini adalah Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Target Tahun 2020 ditetapkan sebesar 95% dan realisasi sebesar 97,84%. Capaian sebesar 102,98% merupakan hasil monitoring terhadap perubahan nilai yang menjadi indikator perhitungan nilai. Koordinasi dengan PIC terkait penggunaan form IKPA akan dilaksanakan untuk meningkatkan nilai IKPA semaksimal mungkin.

C. Realisasi Anggaran 2020

Indikator IKPA	Triwulan I		
	Bobot Indikator IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA
Pengelolaan UP	8%	100,00%	8,00%
Data Kontrak	0%	0,00%	0,00%
Kesalahan SPM	5%	100,00%	5,00%
Retur SP2D	5%	100,00%	5,00%
Hal III DIPA	5%	99,43%	4,97%
Revisi DIPA	5%	100,00%	5,00%
Penyelesaian Tagihan	0%	0,00%	0,00%
Konfirmasi Capaian Output	10%	0,00%	0,00%
Rekon LPJ	5%	100,00%	5,00%
Perencanaan Kas	0%	0,00%	0,00%
Realisasi	15%	100,00%	15,00%
Pagu Minus	5%	100,00%	5,00%
Dispensasi SPM	5%	100,00%	5,00%

Total	68%		58%
Total Nilai Akhir IKPA	85,25%		

Indikator IKPA	Triwulan II		
	Bobot Indikator IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA
Pengelolaan UP	8%	91,00%	7,28%
Data Kontrak	0%	0,00%	0,00%
Kesalahan SPM	5%	100,00%	5,00%
Retur SP2D	5%	100,00%	5,00%
Hal III DIPA	5%	83,22%	4,16%
Revisi DIPA	5%	100,00%	5,00%
Penyelesaian Tagihan	0%	0,00%	0,00%
Konfirmasi Capaian Output	10%	100,00%	10,00%
Rekon LPJ	5%	100,00%	5,00%
Perencanaan Kas	0%	0,00%	0,00%
Realisasi	15%	100,00%	15,00%
Pagu Minus	5%	100,00%	5,00%
Dispensasi SPM	5%	100,00%	5,00%
Total	68%		66%
Total Nilai Akhir IKPA	97,71%		

Indikator IKPA	Triwulan III		
	Bobot Indikator IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA
Pengelolaan UP	8%	100,00%	8,00%
Data Kontrak	0%	0,00%	0,00%
Kesalahan SPM	5%	100,00%	5,00%
Retur SP2D	5%	100,00%	5,00%
Hal III DIPA	0%	99,56%	0,00%
Revisi DIPA	0%	100,00%	0,00%
Penyelesaian Tagihan	0%	0,00%	0,00%
Konfirmasi Capaian Output	10%	91,67%	9,17%
Rekon LPJ	5%	100,00%	5,00%
Perencanaan Kas	0%	0,00%	0,00%
Realisasi	15%	100,00%	15,00%
Pagu Minus	5%	100,00%	5,00%
Dispensasi SPM	5%	100,00%	5,00%
Total	58%		57%
Total Nilai Akhir IKPA	98,56%		

Indikator IKPA	Triwulan IV		
	Bobot Indikator IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA
Pengelolaan UP	8%	100,00%	8,00%
Data Kontrak	0%	0,00%	0,00%
Kesalahan SPM	5%	100,00%	5,00%
Retur SP2D	5%	100,00%	5,00%
Hal III DIPA	0%	0,00%	0,00%
Revisi DIPA	0%	0,00%	0,00%
Penyelesaian Tagihan	0%	0,00%	0,00%
Konfirmasi Capaian Output	10%	100,00%	10,00%
Rekon LPJ	5%	100,00%	5,00%
Perencanaan Kas	0%	0,00%	0,00%
Realisasi	15%	100,00%	15,00%
Pagu Minus	5%	100,00%	5,00%
Dispensasi SPM	5%	100,00%	5,00%
Total	58%		58%
Total Nilai Akhir IKPA		100,00%	

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

KPKNL Singaraja selama tahun 2020 berhasil merealisasikan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) melebihi atau sama dengan target (hijau), 2 (dua) IKU yang kuning, dan 1 (satu) IKU yang merah yaitu persentase produktivitas lelang disebabkan oleh menurunnya kondisi ekonomi, khususnya pandemi Covid-19 yang memberi efek turunnya daya beli masyarakat selama Q2 s.d Q4, sehingga capaian bea lelang pembeli maupun penjual yang berasal dari lelang PL 1 maupun Pegadaian jauh dari target yang ditetapkan.

2. LANGKAH/STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas perlu diantisipasi agar kinerja berjalan optimal. Berikut ini adalah strategi yang diambil oleh KPKNL Singaraja untuk meningkatkan kinerja tahun 2021 :

No	Seksi	Rencana Kerja	Strategi
1	Pengelolaan Kekayaan Negara	1. Tingkat kesesuaian pengguna BMN dengan SBSK 2. Pelaksanaan percepatan sertipikasi 3. Pengawasan dan pengendalian BMN	Koordinasi dan edukasi terhadap satuan kerja kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian pengguna BMN dengan SBSK Koordinasi dengan Kantor Pertanahan, dan satker target sertipikasi tentang sertipikasi. Pemantauan secara berkala produk pengelolaan BMN untuk memastikan masing-masing satker sudah melaksanakan tindak lanjut.
2	Piutang Negara	1. Tingkat penurunan outstanding piutang negara	Melakukan penagihan secara langsung maupun dengan surat pemanggilan.
3.	Pelayanan Lelang	1. Meningkatkan produktivitas lelang	Melakukan penggalan potensi lelang dari Pemerintah Daerah / BUMD

		2. Optimalisasi pokok lelang	Monitoring dan evaluasi terhadap permohonan lelang yang telah laku untuk dilaksanakan pengecekan kembali supaya menyesuaikan keadaan masyarakat
4.	Pelayanan Penilaian	1. Meningkatkan kualitas layanan bagi pemohon penilaian 2. Pembentukan database penilaian	Memberikan laporan penilaian lebih cepat dan akurat Membuat basis data transaksi / penawaran penjualan/sewa properti sebagai bahan pembandingan penilaian jika sewaktu-waktu diperlukan

Masalah-masalah yang sering dihadapi diharapkan dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan lebih baik sehingga kinerja KPKNL Singaraja akan semakin meningkat dan mencapai hasil yang optimal. Selain itu diharapkan juga agar mampu mengatasi kendala dan masalah yang dihadapi ditahun mendatang, sehingga pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada KPKNL Singaraja dapat berjalan baik dan lancar.

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
TAHUN 2020**

IKU	VIC	Uraian IKU	Target Awal Tahun 2020	Target Addendum	Realisasi								
					Q1	Q2	Semester I	Q3	a.d. Q3	Q4	2020		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
		Pengelolaan kekayaan negara yang optimal											
a-CP	P/M	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX/TLK										
	a.	PNBP Pengelolaan BMN	Rp4,111,635,000	Rp3,207,075,300	Rp 428,615,015	Rp 765,043,346	Rp 765,043,346	43.51%	Rp 1,395,305,090	Rp 1,395,305,090		Rp 2,834,398,261	Rp 2,834,398,261
	b.	PNBP Pinjaman Negara	Rp18,932,394	Rp18,932,000	Rp 9,565,139	Rp 11,901,817	Rp 11,901,817	89.02%	Rp 16,854,074	Rp 16,854,074		Rp 26,781,025	Rp 26,781,025
	c.	PNBP Lelang	Rp2,590,000,000	Rp2,590,000,000	Rp 463,613,553	Rp 752,637,616	Rp 752,637,616	44.86%	Rp 1,161,887,348	Rp 1,161,887,348		Rp 1,807,425,038	Rp 1,807,425,038
		Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp6,720,587,394	Rp5,816,007,300	Rp 901,793,707	Rp 1,529,582,779	Rp 1,529,582,779		Rp 2,574,046,512	Rp 2,574,046,512		Rp 4,668,604,324	Rp 4,668,604,324
		Capaian IKU Sebelum Addendum			13.42%	22.76%	22.76%						
		Capaian IKU Setelah Addendum			15.51%	25.31%	25.31%		44.29%	44.29%		80.27%	80.27%
b-CP	P/M	Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDIS s.d 2018)	MAX/TLK										
		Nilai Outstanding PN dengan Berkas sd 31 Des 2016 /Realisasi PNDIS dengan kriteria berkas sd 31 Des 2016	Rp18,932,394,139		Rp111,472,726	Rp134,199,999	Rp 134,199,999		Rp 549,331,670	Rp 549,331,670		Rp 585,635,306	Rp 585,635,306
		Capaian IKU Sebelum Addendum			99.41%	99.20%	99.20%						
		Capaian IKU Setelah Addendum			0.59%	0.79%	0.79%		3.05%	2.90%		3.09%	3.09%
c-CN	P/H	Pemastan pengukuran Tingkat kesesuaian Penggantian BMN dengan 585K	MAX/TLK										
		Targer/Realisasi	88	51	0	51	51		51	51		51	51
		Capaian IKU Sebelum Addendum			0.00%	57.95%	97.95%					100.00%	100.00%
		Capaian IKU Setelah Addendum			0.00%	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		100.00%	100.00%
		Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien											
d-CP	I/M	Indeks kepuasan pengguna layanan KPN TL	MAX/TLK										
		Targe/Realisasi	4.60									4.61	4.61
		Capaian IKU											4.61
e-CP	P/M	Pengelolaan lelang yang optimal											
		Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	MAX/TLK										
	a.	Pokok Lelang Kelas I	Rp41,763,000,000		Rp8,575,184,809	Rp13,506,819,533	Rp 13,596,819,533		Rp21,838,022,981	Rp 21,838,022,981		Rp34,606,243,999	Rp 34,606,243,999
	b.	Pokok Lelang Pengadaan	Rp28,680,000,000		Rp6,017,892,600	Rp10,039,042,900	Rp 10,939,042,900		Rp14,066,411,500	Rp 14,066,411,500		Rp21,109,940,900	Rp 21,109,940,900
		Targe/Realisasi Pokok Lelang	Rp70,383,000,000		Rp14,597,077,409	Rp23,635,862,433	Rp23,635,862,433		Rp35,904,434,481	Rp35,904,434,481		Rp55,716,184,899	Rp55,716,184,899
		Capaian IKU			20.75%	33.59%	33.59%		51.03%	51.03%		79.18%	79.18%
		Maintenance pelayanan yang berkualitas											
f-CP	P/H	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	MAX/AVG										
		Targe/Realisasi	86		97.55	98.33	97.94		98.00	97.96		97.12	97.75
		Capaian IKU			97.55	98.33	97.94		98.00	97.96		97.12	97.75

IKU	VIC	Uraian IKU	Target Awal Tahun 2020	Target Addendum	Realisasi													
					Q1		Q2		Semester 1		Q3		s.d. Q3		Q4		2020	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)							
		Tata kelola keuangan negara yang efektif																
e-CP	P/I	Persentase bidang tanah BMN yang diperfiksikan	MAX/TUK															
		Target/Realisasi	54	53			54	54		54	54			54	54			
		Capaian IKU sebelum Addendum					100.00%	100.00%										
		Capaian IKU setelah Addendum					101.85%	101.89%		101.89%	101.89%		101.89%	101.89%	101.89%			
e-CP	P/M	Persentase efektifitas penyelesaian BKPN	MAX/TUK															
		BKPN Kategori I (s.d. 31 Des 2010)				3	3	3		4	4			4	4			
		BKPN Kategori II (1 Jan 2011 s.d. 31 Des 2019)				59	59	59		84	84			92	92			
		BKPN Kategori III (Tahun 2020)				0	1	1		1	1			1	1			
		Jumlah BKPN	50	65		62	63	63		89	89			97	97			
		Capaian IKU sebelum Addendum				122.00%	120.00%	120.00%										
		Capaian IKU setelah Addendum				97.00%	98.46%	98.46%		119.23%	119.23%		131.54%	131.54%	131.54%			
e-CP	P/M	Persentase nilai kekayaan negara yang diotiasi	MAX/TUK															
		Target/Realisasi	Rp98,079,000,000	Rp333,079,000,000		83,774,466,621	230,447,749,204	230,447,749,204		378,791,235,922	378,791,235,922		418,081,476,443	418,081,476,443	418,081,476,443			
		Capaian IKU				85.42%	234.96%	234.96%		113.72%	113.72%		125.52%	125.52%	125.52%			
e-CP	P/M	Persentase implementasi evaluasi kinerja BUMN (portofolio aset)	MAX/TUK															
		Target/Realisasi	12	12		0	15	15		15	15			20	20			
		Capaian IKU sebelum Addendum				0.00%	125.00%	125.00%										
		Capaian IKU setelah Addendum				0.00%	125.00%	125.00%		125.00%	125.00%		166.67%	166.67%	166.67%			
		Pembian yang berkualitas																
e-CP	P/M	Dimisi ketegangan hasil pembian	MIN/AVG															
		Target/Realisasi	30%			5.49%	0.00%	2.75%		0.00%	1.83%		1.13%	1.66%				
		Capaian IKU				181.70%	209.00%	198.85%		200.00%	189.90%		196.23%	198.48%	198.48%			
		Tata lola/efektif vone efektif																
e-CP	P/M	Persentase awal/aktivitas lelang	MAX/TUK															
		Jumlah Frekuensi Lelang Laku Secara keseluruhan				31	47	47		85	85			146	146			
		Jumlah Frekuensi Lelang secara keseluruhan				68	101	101		173	173			277	277			
		% Lelang laku keseluruhan				45.59%	46.53%	46.53%		49.13%	49.13%		52.71%	52.71%	52.71%			
		Jumlah Frekuensi Lelang Laku Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000				-	-	-		-	-			-	-			
		Jumlah Frekuensi Lelang Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000				-	-	-		-	-			-	-			
		% Lelang laku sukarela nilai <=500.000				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Capaian IKU				45.59%	46.53%	46.53%		49.13%	49.13%		52.71%	52.71%	52.71%			
e-CP	P/M	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	MAX/TUK															
		Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction				68	101	101		173	173			275	275			
		Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction				-	-	-		-	-			2	2			
		Capaian realisasi e-Auction				100.00%	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		99.28%	99.28%	99.28%			
		Capaian Realisasi e-Conventional Auction				0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.72%	0.72%	0.72%			
		Capaian IKU				100.00%	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%			
		Edukasi yang efektif																

8

IKU	VIC	Uraian IKU	Target Awal Tahun 2020	Target Addendum	Realisasi										
					Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2020				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
3a-N	P/M	Tingkat efektivitas edukasi dan sosialisasi	MAX/TUK												
		Target/Realisasi	87			91.37	91.37			91.37		93.11	92.24		
Capaian IKU						106.32%	106.07%		106.02%		107.02%	106.02%			
Penguasaan dan pengendalian yang efektif															
3a-CP	P/M	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	MAX/TUK												
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2019 yang ditindaklanjuti oleh K/L				26	26			26		28	28		
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L				0	0			0		17	17		
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2019				28	28			28		28	28		
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2020				0	0			0		17	17		
Capaian IKU						92.86%	92.56%		92.86%		100.00%	100.00%			
3a-CP	P/M	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	MAX/TUK												
		Rincian Realisasi Per Status	NUP Target Awal Tahun 2020	NUP Target Addendum	Jumlah NUP Selesai s.d. Triw. Status	Realisasi x Bobot (Q1)	Jumlah NUP Selesai s.d. Q2 tiap status	Realisasi x Bobot (Q2)	Realisasi x Bobot (S1)	Jumlah NUP Selesai s.d. Q3 tiap status	Realisasi x Bobot (Q3)	Realisasi x Bobot (s.d. Q3)	Jumlah NUP Selesai s.d. Q4 tiap status	Realisasi x Bobot (Q4)	Realisasi x Bobot (2020)
		Status I (10%)				0.00		0.00	0.00		0.00	0		0.00	0
		Status II (20%)				0.00		0.00	0.00		0.00	0		0.00	0
		Status III (30%)				0.00		0.00	0.00		0.00	0		0.00	0
		Status IV (40%)				0.00		0.00	0.00		0.00	0		0.00	0
		Status V (60%)				0.00		0.00	0.00	40.00	0.00	24		0.00	0
		Status VI (70%)				0.00		0.00	0.00		24.00	0		0.00	0
		Status VII (80%)				0.00		0.00	0.00		0.00	0		0.00	0
		Status VIII (90%)				0.00		0.00	0.00	338.00	270.40	270	7.00	5.60	6
		Status IX (100%)				0.00		0.00	0.00		0.00	0	126.00	113.40	113
		Status X (100%)				0.00		0.00	0.00		0.00	0	246.00	246.00	246
		Total Target/ Realisasi tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	367	367		0.00		0.00	0.00		294.40	294.40		365.00	365.00
Capaian IKU sebelum Addendum						0.00%	0.00%	0.00%							
Capaian IKU setelah Addendum						0.96%	0.00%	0.00%			60.22%	60.22%		97.46%	96.40%
SDM yang kompeten															
3a-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX/TUK												
		Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria			4		16	16		27	27		27		
		Jumlah bawahan total			28		28	28		28	28		28		
% Capaian Utama						14.29%	57.14%	57.14%		96.43%	96.43%		96.43%		
		Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria			4		16	16		27	27		27		
		Jumlah bawahan total			28		28	28		28	28		28		
% Capaian Tambahan						14.29%	57.14%	57.14%		96.43%	96.43%		96.43%		
Capaian IKU						17.14%	68.57%	68.57%		115.71%	115.71%		115.71%		
Organisasi yang fit for purpose															
3a-N	P/M	Nilai hasil review pengelolaan kinerja instansi BSC	MAX/TUK												

IKU	VIC	Uraian IKU	Target Awal Tahun 2020	Target Addendum	Realisasi						
					Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2020
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Target/Realisasi	70							92.70	92.70
		Capaian IKU								92.70	92.70
IS-V	P/M	Indeks efektivitas pelaksanaan KGD oleh S/t Pegawai	MAK/TUK								
		Target/Realisasi	88			92.22	92.22	93.00	92.61	91.00	92.07
		Capaian IKU				92.22	92.22	93.00	92.61	91.00	92.07
		Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal									
IS-CP	P/M	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	MAK/ANG								
		Target/Realisasi	95%					100.00%	100.00%	95.75%	97.90%
		Capaian IKU						100.00%	100.00%	95.75%	97.90%

Mengotakan,
Kepala KUPU Singaraja

Sani Hadi
NIP.196705281992031003

Singaraja, 11 Januari 2021
Kepala Seksi Kepatuhan Internal

Ni Made Kusumawardani
NIP.197101291994032001



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA**